

Ekonomi Hijau dan Etika dalam Keuangan Bisnis

Hotniati Simamora

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak
email: hotniati_s@widyadharm.ac.id

Abstract

In financial management, a very crucial thing is the importance of ethical decision-making. It highlights that ethical finance involves moral considerations and social responsibility in every financial decision made by a business. This includes transparency in financial reporting, fair treatment of all stakeholders, and avoiding practices that harm society or the environment. This article emphasizes that ethical finance is not only a moral responsibility, but also a foundation for long-term success and business sustainability. Perlu also discussed the concept of sustainable development in Indonesia, which is seen as a necessity. It is stated that as long as renewable resources are managed properly and consistently, Indonesia has the potential to become a hopeful country for an unlimited time. However, development financing is a limitation, as domestic funding sources, especially third-party funds, are insufficient to meet the growing demand for financing. That the international financial community can be an alternative source of funding, as long as the debt service ratio is manageable and does not cause financial problems. The potential of green bonds as an alternative source of financing for sustainable development in Indonesia. This shows that the government and authorities need to provide incentives to encourage the growth of green bonds in the country. Finally, that integrity is the foundation for ethical financial management, which includes transparency in financial reporting and honesty in business practices. Pope Francis has also stressed the importance of policymakers and regulators in the green economy movement.

Key words: green economy, green bonds, *laudato si*, financial ethics

Abstrak

Dalam manajemen keuangan, hal yang sangat krusial adalah pentingnya pengambilan keputusan yang etis. Ini menyoroti bahwa keuangan etis melibatkan pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan keuangan yang dibuat oleh bisnis. Ini termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan, perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Artikel ini menekankan bahwa keuangan etis bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga landasan untuk kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Perlu juga membahas konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Disebutkan bahwa selama sumber daya terbarukan dikelola dengan baik dan konsisten, Indonesia berpotensi menjadi negara yang penuh harapan untuk waktu yang tidak terbatas. Namun, pembiayaan pembangunan merupakan batasan, karena sumber pendanaan domestik, terutama dana pihak ketiga, tidak cukup untuk memenuhi permintaan pembiayaan yang terus meningkat. Bahwa komunitas keuangan internasional dapat menjadi sumber pendanaan alternatif, selama rasio pembayaran utang dapat dikelola dan tidak menimbulkan masalah keuangan. Potensi obligasi hijau sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas perlu memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan obligasi hijau di Tanah Air. Akhirnya, integritas itu adalah dasar untuk manajemen keuangan yang etis, yang mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan dan kejujuran dalam praktik bisnis. Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya pembuat kebijakan dan regulator dalam gerakan ekonomi hijau.

Kata kunci: ekonomi hijau, obligasi hijau, *laudato si*, etika keuangan

A. PENDAHULUAN

Dalam dua ratus tahun terakhir, ekonomi global telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Selama periode ini, kami menyaksikan peningkatan kualitas harapan hidup dan standar hidup bagi banyak orang. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi itu sendiri tidak dapat dianggap sebagai hal yang negatif. Namun, hal ini juga memiliki dampak negatif, terutama terkait perubahan lingkungan. Meskipun ekonomi telah tumbuh dan berkembang, telah terjadi peningkatan nyata dalam emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global menjadi semakin sering. Peristiwa-peristiwa ini, bersama dengan komitmen kelompok dan gerakan lingkungan, akhirnya membangkitkan minat yang lebih besar pada isu-isu ekologi dan lingkungan di pihak masyarakat sipil dan, akibatnya, juga di pihak lembaga-lembaga politik yang mewakili kita. Investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti yang akan diperdebatkan dalam artikel ini, selalu ada dalam arti tertentu, oleh karena itu, investor yang memilih investasi mereka dengan menghormati apa yang disebut "kriteria etis" bukanlah hal baru. Yang penting untuk dianalisis di sini adalah bagaimana institusi merencanakan perubahan arah yang dituntut oleh masyarakat sipil. Masyarakat kapitalis, pada kenyataannya, telah bertahun-tahun mengabaikan aset terpenting yang dimilikinya: bumi. Keuangan saja tentu tidak akan mencoba memproyeksikan masa depan menuju perubahan, tetapi dorongan ini harus datang dari setiap sektor masyarakat sipil. Ekonomi kita bergantung pada lingkungan yang sehat. Sangat penting bagi kita untuk menemukan cara untuk melanjutkan pembangunan ekonomi tanpa efek negatif terhadap lingkungan.

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.¹

Pemerintah Indonesia terus mendorong *ekonomi hijau* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Ekonomi hijau sebagai konsep pembangunan telah lama diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional.

Konsep ekonomi hijau pertama kali diperkenalkan² pada tahun 1989 dalam sebuah laporan yang disampaikan oleh para ekonom lingkungan kepada pemerintah Inggris. Cakupan *isu ekonomi hijau* juga meluas tidak hanya terkait kebijakan lingkungan di suatu negara, tetapi juga isu-isu global seperti perubahan iklim, deforestasi, kebakaran hutan, penipisan lapisan ozon, dan sebagainya.

Arah yang diambil dalam penulisan artikel ini dibenarkan oleh fakta bahwa obligasi yang berdampak positif, terutama obligasi hijau, adalah alat utama untuk mempromosikan transisi ke ekonomi rendah karbon.

Dalam ekonomi hijau, lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ekonomi hijau beroperasi pada tingkat makroekonomi dan berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berfokus pada pengelolaan sumber daya dan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan inflasi.

Gagasan ekonomi hijau tidak serta merta menggantikan pembangunan berkelanjutan, tetapi malah menciptakan fokus baru di bidang ekonomi, investasi, infrastruktur dan modal, serta pekerjaan dan keterampilan.

¹ <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-hijau/>

² [Bagaimana Kita Bisa Mendefinisikan Perbedaan Antara Ekonomi Biru dan Hijau? \(sinay.ai\)](#)

Pada tahun 2008, istilah ekonomi hijau kembali digaungkan dalam diskusi untuk merespon berbagai krisis global. UNEP memperjuangkan gagasan "*Paket Stimulus Hijau*" dan mengidentifikasi bidang-bidang tertentu yang dapat memulai konsep "ekonomi hijau". Selanjutnya, pada Oktober 2008, UNEP meluncurkan *Green Economy Initiative* (Prakarsa Ekonomi Hijau) untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan di sektor hijau dan sektor hijau yang tidak ramah lingkungan. Sebagai bagian dari Inisiatif ini, UNEP meminta salah satu penulis untuk *Cetak Biru untuk Ekonomi Hijau* untuk menyiapkan laporan berjudul *Global Green New Deal* (GGND), yang dirilis pada bulan April 2009. GGND meminta pemerintah negara-negara di dunia untuk mengalokasikan sebagian besar dana stimulus ke sektor hijau dan menetapkan tiga tujuan:

1. pemulihan ekonomi;
2. pengentasan kemiskinan;
3. pengurangan emisi karbon dan degradasi ekosistem; dan
4. mengusulkan kerangka kerja untuk program stimulus ramah lingkungan serta kebijakan domestik dan internasional yang mendukung.

Pada Juni 2009, menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, PBB mengeluarkan pernyataan antarlembaga yang mendukung ekonomi hijau sebagai transformasi untuk mengatasi berbagai krisis. Selanjutnya, pada bulan Februari 2010, para Menteri dan Ketua Delegasi Forum Lingkungan Menteri Global UNEP di Nusa Dua mengakui dalam deklarasi mereka bahwa konsep ekonomi hijau "dapat secara signifikan mengatasi tantangan saat ini dan *memberikan peluang pembangunan ekonomi dan manfaat ganda bagi semua negara*". Selanjutnya, ekonomi hijau menjadi salah satu tema penting dalam konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 (Rio + 20). Ekonomi hijau juga merupakan salah satu item penting dalam *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (SDGs), terutama poin ke-8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

B. METODE DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang sistematis. Pencarian artikel ilmiah dilakukan pada database Scopus dengan menggunakan kata kunci "responsible investment", "sustainability", dan "green economy". Kriteria inklusi mencakup artikel berbahasa Inggris yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023. Dari 120 artikel yang diidentifikasi, 50 artikel yang paling relevan dipilih untuk analisis mendalam. Data diekstraksi dan disintesis menggunakan pendekatan tematik.

Untuk menemukan garis kontinuitas Ekonomi Hijau marilah kita belajar dari tulisan-tulisan utama Paus Fransiskus, yaitu Anjuran Apostolik *Evangelii Gaudium* dan Ensiklik *Laudato si*, seseorang tidak dapat membatasi diri pada kutipan eksplisit: namun demikian, tidak luput dari perhatian kita bahwa setidaknya ada kutipan dari teks-teks lain, seperti *Caritas in Veritate* Paus Benediktus XVI. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa, bahkan di luar referensi langsung, *Evangelii Gaudium* dan

Realitas lebih penting daripada ide. Tapi realitas apa yang kita bicarakan? Mari kita pahami orientasi Paus Fransiskus. Faktanya, fakta-fakta yang diberikan sebagai titik awal bukanlah kontinjensi historis secara umum. Selain itu, jika diambil secara sepihak, paradigma seperti itu akan berisiko mensakralkan yang sudah ada, mengangkatnya ke kriteria semua penilaian. Ini akan menjadi kesalahan, karena akan mendukung impotensi kebebasan dalam menghadapi "fakta kasar" yang diwakili oleh aliran peristiwa.

Dan di sini ia mewajibkan kita untuk "merenungkan terlebih dahulu martabat luar biasa orang miskin dalam terang keyakinan iman yang terdalam" (Laudato si', no. 158; cf. Evangelii Gaudium, no. 186-201). 201). Realitas ini mengandung di dalamnya luka yang jauh di dalam fraktur, luka dari mana jeritan melengking muncul: semuanya salah karena manusia, alih-alih bekerja sama dan saling membantu, berdiri di jalan satu sama lain. Alih-alih harmoni antara manusia dan lingkungan, kita menyaksikan penjarahan sumber daya. Alih-alih mencari kebaikan bersama, keegoisan dan eksploitasi berkuasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan Paus Fransiskus adalah penafsiran ulang dari apa yang dalam tradisi teologis disebut 'dosa asal', hanya saja sekarang *infleksi* tidak terutama pada kunci moral pribadi tetapi pada kunci sosial, menyentuh hubungan manusia antara mereka dan dengan lingkungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa investasi yang bertanggung jawab memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan dan ekonomi hijau. Beberapa temuan kunci adalah:

Kontribusi terhadap tujuan keberlanjutan

Investasi yang bertanggung jawab mendorong alokasi modal untuk proyek dan perusahaan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018). Ini termasuk investasi di sektor energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan teknologi bersih (Friede et al., 2015).

Lima Prinsip Ekonomi Hijau³

Dalam penerapannya, ekonomi hijau memiliki lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut merupakan indikator inisiatif ekonomi hijau, yaitu sebagai berikut.

1. Kesejahteraan

Ekonomi hijau memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat berkreasi dan merasakan kesejahteraan.

- Ekonomi hijau berpusat *pada rakyat* yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
- Ekonomi hijau berfokus pada peningkatan pendapatan yang mendukung kesejahteraan. Ini tidak hanya finansial tetapi juga mencakup semua modal manusia seperti modal sosial, modal fisik, dan alam.
- Ekonomi hijau memprioritaskan investasi dan akses ke sistem berkelanjutan, infrastruktur, dan pendidikan yang dibutuhkan.
- Ekonomi hijau menawarkan peluang untuk hidup, bisnis, dan pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak.
- Ekonomi hijau dibangun di atas aksi kolektif untuk kebaikan bersama.

2. Keadilan

Ekonomi hijau mendorong kesetaraan di semua generasi.

- Ekonomi hijau bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, serta mendukung pemberdayaan perempuan.
- Ekonomi hijau berupaya mengurangi kesenjangan sambil memberi ruang bagi satwa liar.
- Ekonomi hijau bertujuan untuk menjaga ketahanan bagi generasi mendatang, serta mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan multidimensi saat ini.

³ 5 Prinsip Ekonomi Hijau. (n.d.). Koalisi Ekonomi Hijau. Diakses tanggal March 9, 2024, from <https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/the-5-principles-of-green-economy>

- Ekonomi hijau melindungi hak asasi manusia, hak-hak pekerja, masyarakat adat dan minoritas, dan hak atas pembangunan berkelanjutan.
- Ekonomi hijau mendorong pemberdayaan UMKM, wirausaha sosial, dan berbagai mata pencaharian berkelanjutan.

3. *Batas Planet*

Ekonomi hijau melestarikan, memulihkan, dan berinvestasi di alam.

- Ekonomi hijau mengakui dan memelihara nilai-nilai yang ada di alam seperti nilai fungsional, nilai budaya, dan nilai ekologi.
- Ekonomi hijau mengenal batas-batas alam sehingga menerapkan kehati-hatian dalam penggunaannya.
- Ekonomi hijau melindungi, menumbuhkan, dan memulihkan keanekaragaman hayati, tanah, air, udara, dan sistem alam.
- Ekonomi hijau menekankan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip sirkularitas.
- Efisiensi dan *Kecukupan*
- Ekonomi hijau mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- Ekonomi hijau inklusif rendah karbon, melestarikan sumber daya, dan sirkular untuk mewujudkan ekonomi yang menjawab tantangan krisis di planet bumi.
- Ekonomi hijau mengakui bahwa harus ada perubahan global yang signifikan untuk membatasi penggunaan sumber daya.
- Ekonomi hijau menyelaraskan kewajiban untuk membayar pencemar dan memberikan insentif bagi siapa saja yang peduli terhadap lingkungan.
- *Tata Kelola yang Baik*
- Membangun integrasi antarlembaga yang dinamis, berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal yang relevan.
- Ekonomi hijau mengintegrasikan ekonomi ramah lingkungan yang bersifat interdisipliner.
- Ekonomi hijau oleh institusi yang terintegrasi, kolaboratif dan koheren, baik secara horizontal lintas sektor maupun vertikal antar tingkat pemerintah.

Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia

Ekonomi hijau di Indonesia didefinisikan sebagai model pembangunan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Definisi ini diadopsi dari UNEP yang kemudian dipersempit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia, Bappenas telah bekerja sama dengan *Global Green Growth Institute* sejak tahun 2013.⁵ Ada 3 sektor yang menjadi kunci terwujudnya ekonomi hijau Indonesia, yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah bertindak progresif untuk membangun ekonomi hijau dalam berbagai dokumen, salah satunya dalam RPJMN 2020-2024 yang memuat

⁴ Haris, A.M., & Purnomo, E. P. (2016). Implementasi CRS (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Desa Padang Loang, Seppang, dan Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 3(2), 203 – 225.

⁵ <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/>

Pembangunan Rendah Karbon (PRK).⁶ Ada tiga strategi utama dalam pembangunan rendah karbon, antara lain mengurangi gas rumah kaca untuk mencapai emisi nol bersih, stimulus hijau untuk memulihkan ekonomi, dan menerapkan pembangunan rendah karbon untuk memenuhi target dalam RPJMN 2020-2024⁷.

Investasi yang bertanggung jawab memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan produk, layanan, dan teknologi inovatif yang mendukung ekonomi hijau (Busch et al., 2021). Ini termasuk solusi hemat energi, sistem daur ulang, dan model bisnis sirkular (Bocken et al., 2019).

Obligasi Hijau

Jenis utang ini juga dikenal sebagai *obligasi hijau*.⁸ Ini adalah efek utang yang modalnya akan digunakan untuk membiayai KUBL. KUBL adalah singkatan dari Kegiatan Usaha Ramah Lingkungan. Ini berarti bahwa modal yang diinvestasikan akan digunakan untuk kegiatan bisnis yang terkait dengan lingkungan.

Beberapa contoh bentuk KUBL yang didanai oleh *obligasi hijau* adalah energi terbarukan, penggunaan lahan berkelanjutan, dan efisiensi energi. Selain itu, transportasi ramah lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan air juga disertakan. Masih banyak lagi bentuk KUBL yang masuk dalam daftar *pendanaan obligasi hijau* di Tanah Air.

Ternyata bentuk green bond ini memberikan berbagai manfaat. Tak heran jika popularitas instrumen investasi ini terus meningkat. Berikut adalah beberapa keuntungan dari *obligasi hijau*:⁹

1. Berkontribusi terhadap Lingkungan

Sesuai dengan konsepnya, *green bond* mampu berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Dalam pembahasan mengenai apa itu green bond, telah disebutkan bahwa obligasi tersebut diterbitkan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa investor yang membeli obligasi ini nantinya akan berkontribusi langsung terhadap lingkungan.

2. Menguntungkan Banyak Orang

Berinvestasi melalui *instrumen obligasi hijau* tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor. Lebih dari itu, manfaat investasi dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Sesuai dengan tujuan sebelumnya, *green bond* adalah bentuk surat utang di mana modal investasi akan digunakan untuk proyek-proyek lingkungan.

3. Memberikan Penghasilan Pasif

Instrumen investasi berupa surat utang menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan *passive income*. Perlu diketahui bahwa salah satu keuntungan investasi

⁶ Ekonomi hijau... Platform Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan. (n.d.). Pembangunan Berkelanjutan. Diakses tanggal March 9, 2024, from <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/greeneconomy/decisions>

⁷ <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/>

Abigail, P. Y. D. (2023). Green Bond Bank Mandiri mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 3,7 kali. Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/64953dd8533ad/green-bond-bankmandiri-kelebihan-permintaan-3-7-kali>

⁹ Krisna Wijaya, adalah Fakultas Senior dan salah satu penggagas berdirinya Center for Sustainable Finance and Knowledge, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (CSFK – LPPI). CSFK – LPPI Diskusi Triwulanan,

Kampus LPPI, Jakarta, 27 Mei 2017

https://lppi.or.id/site/assets/files/1461/tentang_green_bond_-_krisna_wijaya.

obligasi didapatkan dari kupon atau bunga yang dibagikan secara rutin hingga jatuh tempo. Kupon ini bisa menjadi *passive income* bagi investor yang memegang obligasi.

4. Bagus untuk Investor Pemula

Investor pemula yang baru memulai langkah investasinya sebaiknya memilih *obligasi hijau* dengan jangka pendek dan menengah. Jauh lebih aman dan risikonya sangat rendah. Jika dibandingkan dengan investasi saham, obligasi ini jelas jauh lebih aman dan mudah dikendalikan bagi pemula di bidang investasi.

Efektivitas investasi yang bertanggung jawab tergantung pada kolaborasi antara investor, perusahaan, dan pembuat kebijakan (Schoemaker & Schramade, 2019). Dialog konstruktif dan inisiatif bersama diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung investasi berkelanjutan (Eccles & Klimenko, 2019).

Harus diakui bahwa masih ada kesulitan dalam menentukan batasan apa saja yang diperbolehkan dan tidak terkait dengan alokasi Green Bonds. Misalnya, apa yang terjadi di China. Mereka adalah salah satu penghasil karbon terbesar di dunia tetapi juga merupakan penerbit Obligasi Hijau terbesar No. 2 di dunia. Untuk menghadapi kritik tersebut, pihaknya memberikan bukti bahwa meski ditujukan untuk PLTU batu bara, fasilitas baru ini lebih bersih dari PLTU sebelumnya.¹⁰

Integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasi membantu mengurangi risiko terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan konflik sosial (Khan et al., 2016). Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung lebih tangguh dalam menghadapi guncangan eksternal (Verheyden et al., 2016).

James Chen (2019), mendefinisikan Green Bonds sebagai obligasi yang dirancang untuk mempromosikan keberlanjutan dan mendukung proyek lingkungan tertentu yang terkait dengan iklim atau lainnya. Proyek yang dapat dibiayai dari dana Green Bond meliputi kegiatan efisiensi energi, pencegahan polusi, pertanian berkelanjutan, perikanan dan kehutanan, perlindungan ekosistem perairan dan darat, transportasi bersih, pengelolaan air berkelanjutan dan budidaya teknologi ramah lingkungan. Untuk beberapa negara, sebagai bentuk daya tarik, Green Bonds disertai dengan insentif pajak seperti pembebasan pajak dan kredit pajak. Dengan demikian, Green Bond memiliki daya tarik lain dibandingkan dengan obligasi biasa. Insentif ini dapat memberikan insentif moneter untuk mengatasi masalah sosial seperti perubahan iklim dan perpindahan ke sumber energi terbarukan.

Untuk memenuhi syarat, Obligasi Hijau harus diverifikasi oleh pihak ketiga seperti Dewan Standar Obligasi Iklim. Verifikasi diperlukan untuk menyatakan bahwa obligasi tersebut untuk mendanai proyek-proyek yang mencakup manfaat bagi lingkungan. Menurut Thomas Kenny (2019), entitas pertama yang menerbitkan Green Bonds adalah Bank Dunia. Saat itu, Bank Dunia meluncurkan program bernama Strategic Framework for Development and Climate Change. Tujuannya adalah untuk membantu dan mengoordinasikan kegiatan sektor publik dan swasta untuk memerangi perubahan iklim. Bank Dunia mengumpulkan dana dari investor melalui Green Bonds untuk mendukung pinjaman Bank Dunia untuk proyek-proyek mitigasi perubahan iklim atau membantu orang-orang yang terkena dampaknya. Produk ini dirancang dalam kemitraan dengan Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) sebagai tanggapan untuk mendukung proyek-proyek yang dapat mengatasi tantangan iklim.

Saat pertama kali jumlah Green Bond yang diterbitkan secara kumulatif mencapai kurang lebih 3,5 miliar dolar AS. Tujuannya adalah untuk fokus pada pembiayaan terkait perubahan iklim. Selama periode 2008-2018, program Green Bond Bank Dunia melebihi lebih dari 10 miliar dolar AS. Ini terdiri dari sekitar 130 obligasi dalam 18 mata

¹⁰ Krisna Wijaya. (2019). Obligasi Hijau. Jurnal Kampus Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

uang yang berbeda. Selain Bank Dunia, Ginnie Mae dan Fannie Mae juga telah menerbitkan Obligasi Hijau, serta Bank Investasi Eropa

Etika Keuangan Bisnis

Etika dalam keuangan bisnis merupakan landasan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku keuangan dalam dunia bisnis¹¹. Etika keuangan bisnis berkaitan dengan keputusan dan tindakan yang diambil dalam ranah keuangan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan integritas. Ini termasuk transparansi, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam semua aspek keuangan perusahaan.

Etika dalam keuangan bisnis adalah fondasi penting yang memandu perilaku dan keputusan keuangan dalam dunia bisnis. Etika keuangan mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang membentuk perilaku keuangan suatu perusahaan. Hal ini penting karena dapat menciptakan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, dan karyawan. Bisnis yang mengedepankan etika keuangan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangannya.

Keandalan dan Integritas

Dalam dunia bisnis, keuangan tidak hanya terkait dengan angka, tetapi juga dengan nilai-nilai etika dasar. Prinsip-prinsip etika keuangan meliputi prosedur yang benar dan adil dalam mengelola keuangan perusahaan. Ini bukan hanya tentang memaksimalkan keuntungan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.

Integritas adalah prinsip moral yang menuntut kejujuran dan konsistensi dalam tindakan keuangan. Perusahaan harus mempertahankan standar etika yang tinggi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa keputusan keuangan didasarkan pada nilai-nilai yang tepat.

Keterbukaan dan Transparansi

Etika dalam keuangan bisnis adalah fondasi penting yang memandu perilaku dan keputusan keuangan dalam lingkungan bisnis. Prinsip-prinsip etika keuangan adalah pedoman praktis yang membantu perusahaan dan individu mengelola keuangan mereka dengan integritas dan tanggung jawab.

Salah satu prinsip utama dalam etika keuangan adalah keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan mencakup kesediaan untuk berbagi informasi secara jujur dan tepat waktu dengan para pemangku kepentingan. Ini menciptakan kepercayaan antara perusahaan, investor, dan publik. Dengan bersikap terbuka, perusahaan menunjukkan integritasnya dan menghindari kesan praktik yang meragukan.

Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang keuangan perusahaan. Ini melibatkan pelaporan yang akurat dan lengkap tentang kinerja keuangan, risiko, dan dampak sosial. Dengan transparansi yang baik, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keadilan Keuangan

Prinsip-prinsip etika keuangan adalah pedoman moral yang memandu keputusan dan tindakan dalam aspek keuangan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi

¹¹ R Sari Mutmainah · Etika Bisnis 2020 untuk Pebisnis: Cara Cerdas Memahami ... Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kinerja dan Perilaku Keuangan

transparansi, kejujuran, tanggung jawab, dan keberlanjutan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan terpercaya.

Keadilan dalam keuangan mengacu pada distribusi sumber daya keuangan yang adil dan peluang dalam organisasi. Ini termasuk upah yang sama untuk pekerja dengan tanggung jawab yang sebanding, serta akses yang sama ke peluang karir. Prinsip ini menentang ketidaksetaraan yang tidak adil dan mendukung pembagian keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Menghindari Konflik Kepentingan

Prinsip-prinsip etika keuangan meliputi nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh perusahaan dalam mengelola aspek keuangannya. Pertama, keterbukaan dan transparansi adalah kuncinya. Perusahaan wajib memberikan informasi keuangan secara jelas dan akurat kepada seluruh pihak terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, dan pihak eksternal.

Salah satu poin krusial dalam prinsip etika keuangan adalah menghindari benturan kepentingan. Ini berarti bahwa kepentingan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan individu atau kelompok yang terlibat dalam bisnis. Misalnya, manajer keuangan harus menghindari keputusan yang dapat memberikan keuntungan pribadi yang tidak adil atau merugikan perusahaan.

Manajemen Keuangan yang Bertanggung Jawab

Dalam Responsible Financial Management, pentingnya perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya ditekankan. Ini termasuk manajemen utang yang bijaksana, investasi berkelanjutan, dan kebijakan pembayaran yang adil. Perusahaan yang bertanggung jawab secara finansial tidak hanya memperhitungkan manfaat finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan mereka.

Penghindaran Penipuan dan Manipulasi

Untuk menghindari penipuan dan manipulasi, perusahaan harus menerapkan kontrol internal yang ketat dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar. Karyawan harus dilibatkan dalam pelatihan etika keuangan untuk memahami konsekuensi dari perilaku tidak etis. Budaya perusahaan yang mengedepankan integritas dan transparansi akan memotivasi individu untuk bertindak etis dalam pengelolaan keuangan.

Manajemen Risiko Etis

Manajemen risiko etis juga merupakan fokus utama. Perusahaan perlu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara bertanggung jawab, tanpa mengeksploitasi atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan orang lain. Keberlanjutan jangka panjang harus diutamakan daripada keuntungan cepat yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip etika dalam keputusan keuangan membantu membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan pelanggan. Perusahaan yang menerapkan etika dalam pengelolaan keuangan juga lebih cenderung mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun citra positif.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Dalam dunia bisnis, menjaga integritas dan etika dalam keuangan merupakan pondasi utama untuk membangun kepercayaan pelanggan dan stakeholder. Salah satu aspek krusial dalam mengamankan etika keuangan adalah pelaporan keuangan yang jujur dan transparan.

Keterbukaan Informasi dalam Laporan Keuangan

Dalam dunia bisnis, etika memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan dan kepercayaan pelanggan. Salah satu aspek penting adalah etika dalam pelaporan keuangan, dengan fokus khusus pada keterbukaan dalam laporan keuangan. Perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pemangku kepentingan. Keterbukaan dalam laporan keuangan berarti menyajikan informasi secara transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Menghindari Praktik Akuntansi yang Meragukan

Pelaporan keuangan yang jujur dan akurat adalah dasar dari integritas bisnis. Etika dalam pelaporan keuangan mencakup kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang benar kepada pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya. Ini termasuk tidak hanya mencatat transaksi secara tepat, tetapi juga menghindari manipulasi data atau penyembunyian informasi yang dapat merugikan kepentingan pihak berelasi.

Investasi Berkelanjutan

Keputusan keuangan etis melibatkan pertimbangan moral dalam memilih opsi keuangan. Ini termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Para pemimpin bisnis perlu mempertimbangkan dampak keputusan keuangan terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.

Pinjaman dan Liabilitas yang Prudent

Menyoroti pentingnya mengelola pinjaman dan kewajiban dengan bijak. Mengambil pinjaman seharusnya tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan finansial sebanyak mungkin, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas kesehatan keuangan perusahaan. Keberlanjutan pembayaran pinjaman dan pemahaman mendalam tentang kewajiban bisnis membantu mencegah risiko keuangan yang tidak terduga.

Pembayaran Pajak yang Wajar

Pembayaran pajak yang adil adalah aspek penting dari etika keuangan. Bisnis etis memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan tidak menghindari pembayaran yang jatuh tempo. Ini melibatkan menghindari praktik manajemen pajak agresif yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Menanamkan Budaya Etika Keuangan dalam Bisnis

1. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Pertama, pendidikan karyawan merupakan langkah penting dalam membangun budaya etis. Semakin banyak karyawan memahami pentingnya integritas dalam keuangan, semakin baik bisnis dapat mencegah perilaku tidak etis. Perusahaan harus menyelenggarakan pelatihan rutin tentang kode etik, kebijakan keuangan, dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar etika keuangan. Ini membantu menciptakan pemahaman bersama tentang norma-norma yang diharapkan.

2. Membangun Kode Etik Perusahaan

Perusahaan yang jelas dan komprehensif. Kode ini harus mencakup nilai-nilai inti perusahaan, prinsip-prinsip keuangan yang benar, dan standar perilaku yang diharapkan dari semua karyawan. Pembentukan Kode Etik yang mudah dipahami dan relevan dengan lingkungan bisnis merupakan landasan untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam setiap transaksi keuangan.

3. Mendorong Laporan Pelanggaran Etika

Membangun budaya etika keuangan membutuhkan komitmen dari semua tingkatan perusahaan. Pemimpin perusahaan harus menetapkan standar etika yang tinggi dan memberi contoh dalam tindakan mereka. Selain itu, keterlibatan karyawan melalui pelatihan etika dan komunikasi terbuka dapat membantu menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai etika dihormati.

Bagian penting dari budaya etika keuangan adalah menyediakan sarana untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan penindasan. Perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi yang aman dan rahasia, seperti hotline pelaporan atau platform online. Melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menangani laporan ini dapat meningkatkan kepercayaan karyawan dan memastikan transparansi.

D. KESIMPULAN

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan dan transisi ke ekonomi hijau. Artikel ini menyoroti kontribusi investasi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan, pengurangan risiko, dan pengembangan inovasi hijau. Kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang efektif dalam mempercepat adopsi investasi yang bertanggung jawab di berbagai sektor dan wilayah. Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh setiap negara. Khusus untuk Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsekuensi mengingat sumber daya alam yang luas dan potensial. Selama semua sumber daya terbarukan dikelola dengan baik dan konsisten, Indonesia akan menjadi negara yang penuh harapan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sumber pembiayaan pembangunan memang menjadi keterbatasan tersendiri. Hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri, terutama berbasis dana pihak ketiga (DPK), tentu tidak cukup. Sejak Orde Baru, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola perbankan hanya tumbuh di kisaran rata-rata 14-15 persen. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan pembiayaan dalam bentuk kredit kepada perbankan cenderung lebih tinggi. Dengan demikian, selalu dalam kondisi kesenjangan investasi, di mana tidak semua pembiayaan dalam bentuk kredit dapat dipenuhi oleh dana dalam negeri.

Sebenarnya, tidak ada negara yang tidak memiliki utang karena alasan yang berbeda. Untuk alasan ini, komunitas keuangan internasional adalah bagian dari sumber pendanaan alternatif. Selama sesuai dengan kemampuan yang diukur dengan *debt service ratio* (DSR), tidak akan menimbulkan masalah keuangan, apalagi berdampak sistemik. Oleh karena itu, Green Bond jelas merupakan alternatif sumber pembiayaan yang tampaknya tumbuh mengikuti obligasi konvensional. Secara teoritis, tentu saja Indonesia memiliki kepentingan terhadap Green Bonds. Membangun dengan selalu melestarikan sumber daya alamnya.

Dengan kombinasi kebijakan dari Pemerintah dan Otoritas, akselerasi pertumbuhan *Green Bond* di Indonesia terus dipredikatkan sebagai alternatif sumber pembiayaan yang potensial. Adanya insentif untuk penerbitan Green Bond tampaknya perlu untuk mengundang banyak peminat. Karena semuanya sulit sebelum menjadi mudah.

Pertama-tama, integritas adalah fondasi utama dalam mengelola keuangan bisnis. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan kejujuran dalam praktik bisnis adalah inti dari integritas. Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis adalah keuntungan jangka panjang dari praktik etika keuangan. Dan dalam hal ini, Paus Fransiskus

mengatakan bahwa tentu saja yang sangat penting dalam gerakan Ekonomi Hijau atau Laudato 12 adalah para pengambil keputusan kebijakan dan peraturan, yaitu Pemerintah dan DPR.

Etika dalam keputusan keuangan melibatkan pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap langkah keuangan yang diambil oleh sebuah bisnis. Ini termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan, perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

Kesimpulannya, etika dalam pengelolaan keuangan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga landasan bagi kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, P. Y. D. (2023). Green Bond Bank Mandiri mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 3,7 kali. Katadata.Co.Id.
- Agung Perdana dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Desa Padang Loang, Seppang, dan Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 3(2), 203 – 225
- Bocken, N., Strupeit, L., Whalen, K., & Nußholz, J. (2019). Tinjauan dan evaluasi alat inovasi model bisnis sirkular. *Keberlanjutan*, 11(8), 2210.
- Dokumen, kamus, dan ensiklopedia. Adisusanto, F. X., et al., (Ed.,) Seri Dokumen Gerejawi No. 98. Laudato Si.
- Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). Revolusi investor. *Ulasan Bisnis Harvard*, 97(3), 106-116.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG dan kinerja keuangan: bukti agregat dari lebih dari 2000 studi empiris. *Jurnal Keuangan & Investasi Berkelanjutan*, 5(4), 210-233.
- Haris, A.M., & Purnomo, E. P. (2016). Pelaksanaan CRS (Corporate Social Responsibility) PT. <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/64953dd8533ad/green-bond-bankmandiri-kelebihan-permintaan-3-7-kali>
- https://lppi.or.id/site/assets/files/1461/tentang_green_bond_-_krisna_wijaya.
- <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/>
- [https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-hijau/Bagaimana Kita Bisa Mendefinisikan Perbedaan Antara Ekonomi Biru dan Hijau? \(sinay.ai\)](https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-hijau/Bagaimana_Kita_Bisa_Mendefinisikan_Perbedaan_Antara_Ekonomi_Biru_dan_Hijau?(sinay.ai))
- <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/greeneconomy/decisions>
- <https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/the-5-principles-of-green-economy>. 5 Prinsip Ekonomi Hijau. (n.d.). Koalisi Ekonomi Hijau. Diakses tanggal March 9, 2024.

¹² Dokumen, kamus, dan ensiklopedia. Adisusanto, F. X., et al., (Ed.,) Seri Dokumen Gerejawi No. 98. Laudato Si.

- Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Keberlanjutan perusahaan: Bukti pertama tentang materialitas. *Tinjauan Akuntansi*, 91(6), 1697-1724.
- Krisna Wijaya, adalah Fakultas Senior dan salah satu penggagas berdirinya Center for Sustainable Finance and Knowledge, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (CSFK – LPPI). CSFK – Diskusi Triwulanan LPPI, Kampus LPPI, Jakarta, 27 Mei 2017
- Krisna Wijaya. (2019). Obligasi Hijau. *Jurnal Kampus Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*
- NGOLE PDD (2021) Dokumen, Kamus, dan Ensiklopedia. Adisusanto, F. X., et al., (Ed.,) Seri Dokumen Gerejawi No. 98. Laudato Si.
- R Sari Mutmainah · Etika Bisnis 2020 untuk Pebisnis: Cara Cerdas Memahami ... Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kinerja dan Perilaku Keuangan
- Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2019). Prinsip keuangan berkelanjutan. Oxford University Press.
- Verheyden, T., Eccles, R. G., & Feiner, A. (2016). ESG untuk semua? Dampak penyaringan ESG terhadap pengembalian, risiko, dan diversifikasi. *Jurnal Keuangan Perusahaan Terapan*, 28(2), 47-55.